

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN USAHA BUMN**

NOTA DINAS

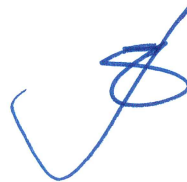
Nomor: AK.03.01/ /// /D.I.M.EKON.1/04/2025

Kepada Yth : Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
Dari : Sekretaris Deputy
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Deputy 1 Triwulan I T.A 2025
Tanggal : 15 April 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas

Dalam rangka implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Triwulan I T.A 2025 untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya. Adapun dokumen pendukung Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dapat diakses pada tautan berikut: https://bit.ly/BuktidukungLapkinD1_TWI_2025.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Deputy



Muhammad Saifulloh

Tembusan Yth.:
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN.

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1.
Ringkasan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha
BUMN Triwulan I Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Program 1. Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas</i>					
1.1	Belanja Modal (Capex) BUMN	Triliun	224,64	41,78	62,01	120,00
1.2	Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR	Persen	80	20	56,01	120,00
1.3	Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah	Persen	80	20	25,00	120,00
II	<i>Sasaran Program 2. Terwujudnya Tingkat Inflasi pada Kisaran Sasaran</i>					
2.1	Tingkat Inflasi	Persen	2,5 ± 1	2,5 ± 1	1,03	68,67
III	<i>Sasaran Program 3. Terwujudnya Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah</i>					
3.1	Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital	Persen	92	91	91	100,00
IV	<i>Sasaran Program 4. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN dan Stabilitas Ekonomi yang Berkualitas</i>					
4.1	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	1	33,33
4.2	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi dan Digitalisasi Daerah	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	1	33,33
V	<i>Sasaran Program 5. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan</i>					

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2025	Target TW I 2025	Realisasi TW I	Capaian (%)
Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas						
5.1	Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3	100,00
VI Sasaran Program 6. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas						
6.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN	Persen	80	20	27,27	120,00

Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1 Sasaran Program 1: Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 1: Terwujudnya Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian tiga indikator kinerja yaitu:

1. Belanja Modal (Capex) BUMN
2. Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR
3. Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Belanja Modal (Capex) BUMN

Latar Belakang

Belanja Modal BUMN merupakan jumlah pengeluaran atau pembelian dari arus kas bersih yang digunakan untuk investasi. IKU Nilai Belanja Modal BUMN menunjukkan bagaimana peran BUMN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional khususnya dari aspek investasi. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 memerlukan investasi BUMN dengan share sekitar 5,48–5,73% disamping investasi yang dilakukan Pemerintah dan swasta. Investasi BUMN yang mendukung prioritas Pembangunan nasional diarahkan pada sektor-sektor strategis yaitu kesehatan, hilirisasi berbasis sumber daya hayati, hilirisasi berbasis tambang, hilirisasi industri berteknologi tinggi, penerapan ekonomi hijau, transisi energi, ekonomi sirkular, pembangunan digital, konektivitas, ketahanan pangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta keuangan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Pengukuran belanja modal BUMN penting untuk dilakukan karena merupakan indikator perusahaan dalam meningkatkan kapasitas dan perluasan bisnis, serta efisiensi operasional perusahaan. Kontribusi belanja modal BUMN yang tinggi mampu memberikan *multiplier effect* dalam menggerakkan banyak sektor ekonomi yang kemudian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

IKU Nilai Belanja Modal menjadi elemen penting dalam mendukung kegiatan investasi yang dilakukan oleh BUMN. Berdasarkan penugasan kepada Deputi 1 terdapat IKU berupa belanja modal BUMN yang menjadi target koordinasi para Asisten Deputi sesuai dengan sektornya sebanyak 21 BUMN. Jumlah ini merupakan bagian dari total BUMN sebanyak 64 yang dikoordinasikan Kementerian BUMN. Jumlah BUMN yang dikoordinasikan dengan kriteria antara lain: merupakan BUMN dengan nilai aset besar, kontribusi terhadap pendapatan negara, BUMN yang sudah tercatat di pasar modal (go public), dan BUMN strategis yang belum/tidak tercatat di pasar modal. Daftar BUMN tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

No	Sektor	BUMN	Target (Miliar Rupiah)
1	Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi	1. PT Telkom	1. 22.920,00
		2. PT Garuda Indonesia	2. 6.423,60
		3. In Journey	3. 6.245,87
2	Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	1. PT Pertamina	1. 81.665,00
		2. MIND ID	2. 9.965,00
		3. PT PLN	3. 49.760,00
3	Sektor Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	1. PT Perkebunan Nusantara III	1. 13.250,40
		2. ID Survey	2. 730,38
		3. DEFEND ID	3. 1.453,39
		4. Holding Farmasi	4. 1.126,89
4	Sektor Infrastruktur dan Logistik	1. PT Pos	1. 235,20
		2. PT ASDP	2. 869,40
		3. PT PELNI	3. 659,40
		4. PT DAMRI	4. 33,60
		5. PT Utama Karya	5. 7.870,80
		6. PT Wijaya Karya	6. 3.431,40
		7. PT Kereta Api Indonesia	7. 8.450,40
5	Sektor Jasa Keuangan dan Bisnis	1. BRI	1. 3.454,06
		2. Mandiri	2. 2.375,00
		3. BNI	3. 2.279,19
		4. BTN	4. 1.437,45

Perhitungan IKU Belanja Modal BUMN merupakan akumulasi nilai belanja modal beberapa BUMN yang memenuhi kriteria, dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Belanja Modal BUMN} = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n$$

Keterangan:

C₁: belanja modal BUMN ke-1

C₂: belanja modal BUMN ke-2

C₃: belanja modal BUMN ke-3

C_n: belanja modal BUMN ke-n

Hasil Pengukuran Kinerja

Target IKU Nilai Belanja Modal BUMN pada tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp224,64 Triliun berdasarkan hasil dialog kinerja serta koordinasi dengan

Kementerian BUMN dan BUMN terkait rencana belanja modal BUMN yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Adapun target triwulan ditetapkan menyesuaikan persentase proyeksi realisasi dari Kementerian BUMN (akumulatif) dengan rincian sebagai berikut:

Periode	Proyeksi KBUMN (%)	Target Deputi (Rp)
s.d. Triwulan I	18,60	41,78 T
s.d. Triwulan II	40,10	90,08 T
s.d. Triwulan III	61	137,03 T
s.d. Triwulan IV	100	224,64 T

Hingga Triwulan I Tahun 2025, belanja modal BUMN (capex) yang telah terealisasi sebesar Rp62,01 T atau mencapai 148,42% dari target Triwulan I tahun 2025 sebesar Rp41,78 T dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1.1 Belanja Modal (Capex) BUMN	Triliun Rupiah	41,78	62,01	120,00

Rincian realisasi belanja modal pada Triwulan I sebagai berikut:

No	Sektor/BUMN	Realisasi TW I (Triliun Rupiah)
Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi		9,23
1	PT Telkom	4,96
2	PT Garuda Indonesia	3,89
3	In Journey	0,38
Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral		45,24
4	PT Pertamina	18,78
5	MIND ID	15,80
6	PT PLN	10,67
Sektor Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan		0,70
7	PT Perkebunan Nusantara III	0,42
8	ID Survey	0,06
9	DEFEND ID	0,05
10	Holding Farmasi	0,18
Sektor Infrastruktur dan Logistik		2,78
11	PT Pos	0,01
12	PT ASDP	0,13
13	PT PELNI	0,05
14	PT DAMRI	0,01
15	PT Utama Karya	2,13
16	PT Wijaya Karya	0,08
17	PT Kereta Api Indonesia	0,38
Sektor Jasa Keuangan dan Bisnis		4,05
18	BRI	1,60
19	Mandiri	1,61
20	BNI	0,56
21	BTN	0,27
Total		62,01

Kebijakan penundaan ekspansi bagi BUMN berdampak kepada menurunnya Capex BUMN, khususnya pada sektor-sektor yang membutuhkan perhatian khusus seperti maskapai penerbangan, industri baja, proyek kereta cepat, dan perusahaan asuransi. Penundaan ekspansi ini dilakukan untuk memberikan

waktu bagi BPI Danantara dalam melakukan konsolidasi dan restrukturisasi BUMN.

Mempertimbangkan capaian belanja modal BUMN sampai dengan Triwulan I serta upaya yang dilakukan, maka target belanja modal BUMN hingga akhir tahun 2025 diproyeksikan dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

1.1 Belanja Modal (Capex) BUMN			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Koordinasi rencana belanja modal (Capex) BUMN tahun 2025 dengan Kementerian BUMN	Terlaksana	Koordinasi bersama Sekretaris Kementerian BUMN telah dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2025
2.	Penetapan Kriteria BUMN yang dilakukan monitoring terkait komponen target realisasi belanja modal	Terlaksana	Telah dibahas dalam Rapat Pimpinan Kedeputian I
3.	Penetapan belanja modal BUMN berdasarkan kebijakan Kementerian BUMN	Terlaksana	Target belanja modal masing-masing BUMN untuk setiap triwulanan sudah disampaikan oleh Kementerian BUMN melalui surat nomor S-18/DKU.MBU/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, selanjutnya dibahas pada Dialog Kinerja.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Kendala utama pada Triwulan I meliputi keterbatasan alokasi anggaran untuk kegiatan koordinasi lapangan dan minimnya ketersediaan data terkini dari BUMN, yang berdampak pada belum optimalnya identifikasi hambatan realisasi capex di masing-masing entitas. Di sisi lain, beberapa BUMN juga belum menjadikan percepatan realisasi capex sebagai prioritas utama, mengingat kebijakan BPI Danantara. Sebagai bentuk upaya perbaikan, pemetaan awal terhadap kendala yang dihadapi masing-masing BUMN mulai dilakukan, serta akan disiapkan sistem pelacakan data capex yang lebih berkala dan terstruktur.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, rekomendasi/upaya perbaikan demi tercapainya target kinerja adalah perlu dilakukan peningkatan intensitas koordinasi dan sinkronisasi secara langsung dengan BUMN, seiring dengan normalisasi alokasi anggaran. Selain itu, akan diupayakan optimalisasi sistem pendataan realisasi capex secara triwulanan, termasuk validasi dan analisis tren pertumbuhan capex berdasarkan sektor dan

kelompok BUMN. Upaya pemetaan masalah dan hambatan per BUMN juga akan diperkuat sebagai dasar penyusunan intervensi kebijakan percepatan realisasi capex yang lebih tepat sasaran.

1.2. Tingkat Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Latar Belakang

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. KUR bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM, dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja.

Program KUR didukung BUMN perbankan selaku lembaga keuangan penyedia pembiayaan serta BUMN penjaminan selaku perusahaan penjamin KUR. Dari sisi lembaga keuangan penyalur KUR, BUMN perbankan merupakan penyalur utama KUR disamping penyaluran yang dilakukan lembaga keuangan lainnya. Selain itu BUMN yang bergerak di bidang penjaminan berperan dalam keberhasilan pelaksanaan mitigasi risiko kredit macet KUR melalui penjaminan program KUR.

Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR dihitung berdasarkan pembobotan indikator yang terdiri dari: (i) capaian penyaluran KUR sektor produksi, (ii) debitur baru KUR, (iii) debitur KUR graduasi/naik kelas, dan (iv) realisasi penyaluran KUR, dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR

No	Indikator	Definisi	Bobot
1	Penyaluran KUR sektor produksi	Penyaluran KUR pada kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa diluar sektor perdagangan.	20%
2	Debitur baru KUR	Debitur yang baru pertama kali memperoleh pembiayaan KUR	15%
3	Debitur KUR Graduasi	Debitur yang mengakses kembali KUR dengan nominal pinjaman yang lebih besar dari pinjaman sebelumnya, baik dalam satu skema maupun antar skema; dan Eks Debitur KUR yang mengakses kredit komersial.	5%
4	Realisasi Penyaluran KUR	Jumlah nominal KUR yang disalurkan kepada debitur	60%

Sumber: Manual IKU Deputi I (2025)

Perhitungan dapat dijelaskan lebih lanjut dengan formula sebagai berikut:

Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR = (20% x capaian penyaluran KUR sektor produksi) + (15% x capaian debitur KUR baru) + (5% x capaian Debitur KUR graduasi/naik kelas) + (60% x realisasi penyaluran KUR)

Keterangan:

1. Penyaluran KUR sektor produksi
 - Perhitungan Realisasi Sektor Produksi adalah porsi penyaluran KUR di sektor produksi dibandingkan dengan total penyaluran KUR selama periode waktu tertentu.
 - Capaian Sektor Produksi Tahunan : $\text{Realisasi Tahunan} / \text{Target Tahunan} \times 100\%$
 - Capaian Sektor Produksi Triwulanan : $\text{Realisasi Triwulanan} / \text{Target Triwulanan} \times 100\%$
 - Bobot yang diperoleh : Capaian x 20%
 - Maksimal capaian bobot yang diperoleh sebesar 20%
2. Debitur baru KUR
 - Perhitungan Debitur baru KUR adalah porsi jumlah debitur baru dibandingkan dengan total debitur KUR selama 1 (satu) tahun.
 - Capaian Debitur KUR Baru : $\text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$
 - Bobot yang diperoleh : Capaian x 15%
 - Maksimal capaian bobot yang diperoleh sebesar 15%
3. Debitur Graduasi/Naik Kelas
 - Debitur graduasi/naik kelas adalah porsi jumlah debitur graduasi dibandingkan dengan total debitur KUR selama 1 (satu) tahun.
 - Capaian Debitur Graduasi/Naik Kelas : $\text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$
 - Bobot yang diperoleh : Capaian x 5%
 - Maksimal capaian bobot yang diperoleh sebesar 5%
4. Realisasi Penyaluran KUR
 - Realisasi Penyaluran KUR adalah jumlah realisasi penyaluran KUR dibandingkan dengan target penyaluran KUR selama 1 (satu) tahun.
 - Capaian Realisasi Penyaluran KUR : $\text{Realisasi} / \text{Target} \times 100\%$
 - Bobot yang diperoleh : Capaian x 60%
 - Maksimal capaian bobot yang diperoleh sebesar 60%

Adapun target dari masing-masing indikator sebagai berikut:

Target Indikator Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR

Indikator	Target				
	Tahunan	TW I	TW II	TW III	TW IV
Penyaluran KUR sektor produksi	54%	54%	54%	54%	54%
Debitur baru KUR	40%	10%	20%	30%	40%
Debitur KUR Graduasi	20%	5%	10%	15%	20%
Realisasi Penyaluran KUR (Rp)	255 T	63,75 T	127,5 T	191,25 T	255 T

Sumber: Manual IKU Deputi I (2025)

Hasil Pengukuran Kinerja

Target IKU Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR pada tahun 2025 adalah sebesar 80% ditetapkan berdasarkan Dialog Kinerja. Adapun target tiap triwulan ditetapkan sebesar 20% dengan menggunakan metode prorata untuk memastikan bahwa target kinerja terdistribusi merata sepanjang tahun, sehingga pencapaian target kinerja dapat lebih terukur dan realistis.

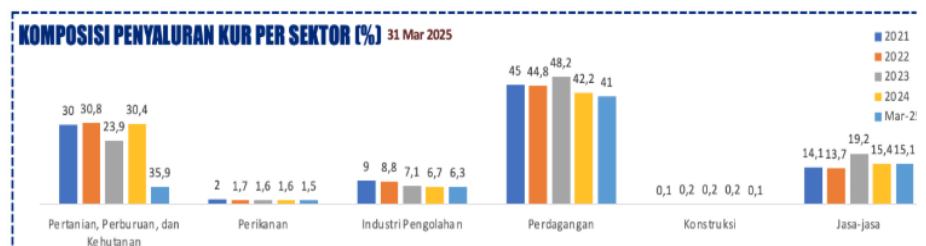
Hingga Triwulan I Tahun 2025, tingkat efektivitas penyaluran KUR yang telah terealisasi sebesar 56,01% atau mencapai 280% dari target Triwulan I tahun 2025 sebesar 20% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1.2 Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR	Persen	20	56,01	120

Perhitungan dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Bobot
Penyaluran KUR sektor produksi (20%)	54%	58,95%	100%	20%
Debitur baru KUR (15%)	40%	45,75%	100%	15%
Debitur KUR Graduasi (5%)	20%	24,63%	100%	5%
Realisasi Penyaluran KUR (60%)	255 T	68,03 T	26,68%	16,01%
Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR				56,01%

- Target Capaian Penyaluran KUR di Sektor Produksi tahun 2025 sebesar 54%. Sampai dengan triwulan I 2025 telah terealisasi sebesar 58,95% atau mencapai 109% dari target Triwulan I 2025 sebesar 54%. Porsi penyaluran KUR per sektor terbesar disalurkan di sektor perdagangan (41%) disusul sektor pertanian (35,9%) dan jasa (15,1%).



No	Sektor Ekonomi	KUR Super Mikro						KUR Mikro						KUR Kecil						KUR Khusus						KUR Penempatan PMI						Total					
		31 Des 2024			31 Mar 2025			31 Des 2024			31 Mar 2025			31 Des 2024			31 Mar 2025			31 Des 2024			31 Mar 2025			31 Des 2024			31 Mar 2025			31 Des 2024			31 Mar 2025		
		Rp Triliun	%	Rp Triliun	%	Rp Triliun	%	Rp Triliun	%	Rp Triliun	%	Rp Triliun	%	Rp Triliun	%	Rp Triliun	%	Rp Triliun	%	Rp Triliun	%	Rp Triliun	%	Rp Triliun	%	Rp Triliun	%	Rp Triliun	%	Rp Triliun	%	Rp Triliun	%				
1	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	0,1	9,7	19,3	43,2	78,8	39,8	0,0	6,9	17,2	20,6	5,1	22,0	-	0,00082	100%	0,0	1,2	0,0	10,9	96,1	34,0	24,4	35,9													
2	Perikanan	0,0	1,5	0,8	1,8	3,4	1,7	-	-	1,0	1,2	0,2	1,1	-	-	-	-	0,0	1,4	4,4	1,6	1,0	1,5														
3	Industri Pengolahan	0,0	3,2	2,8	6,3	13,5	6,8	-	-	5,3	6,4	1,5	6,3	-	-	-	0,0	1,2	0,0	4,3	18,8	6,7	4,3	6,3													
4	Perdagangan	0,8	73,0	15,9	35,6	75,4	38,1	-	-	42,9	51,6	12,0	51,4	-	-	-	0,0	0,3	0,1	70,0	119,2	42,2	27,9	41,0													
5	Konstruksi	0,0	0,0	0,001	0,1	0,2	0,1	-	-	0,4	0,4	0,1	0,2	-	-	-	0,0	0,9	-	-	0,5	0,2	0,1	0,1													
6	Jasa-jasa	0,1	12,7	5,8	13,1	26,9	13,6	0,0	9,1	16,5	19,8	4,4	19,0	-	-	-	0,044	96,5	0,011	13,4	43,5	15,4	10,3	15,1													
	Pemerataan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
	Total	1,1	100	44,6	100	198,1	100	0,0	100	83,2	100	23,3	100	-	0,00082	100%	0,046	100,0	0,082	100,0	232,44	100	68,02	100													

- Berdasarkan data yang diambil dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) pada tanggal 31 Maret 2025, didapatkan hal sebagai berikut:
 - Total debitur KUR s.d. 31 maret 2025 sebanyak 1,19 juta debitur dengan rincian debitur KUR Super Mikro (8,88 ribu orang), debitur KUR Mikro (1,08 juta orang), debitur KUR Kecil (94,97 ribu orang), KUR Penempatan PMI (707 orang)
 - Persentase Debitur KUR Baru dengan target tahun 2025 sebesar 40%. Sampai dengan triwulan I 2025 telah terealisasi sebesar 45,75% atau mencapai 100% dari target Triwulan I 2025 sebesar 10%.
 - Persentase Debitur KUR Baru dengan target tahun 2025 sebesar 20%. Sampai dengan triwulan I 2025 telah terealisasi sebesar 24,63% atau mencapai 100% dari target Triwulan I 2025 sebesar 5%.
 - Realisasi KUR Jan 2025 s.d. 31 Maret 2025 sebesar Rp68,03 triliun (23,66% dari target tahun 2025 sebesar Rp287,47 triliun) dan diberikan kepada 1,19 juta debitur.

- e. Total outstanding KUR per posisi 31 Maret 2025 sebesar Rp521 triliun yang diberikan kepada 50,50 juta debitur dengan NPL sebesar 2,19%*.
- f. Penyaluran KUR selama tahun 2025 berdasarkan jenis yaitu KUR Super Mikro (0,12%), KUR Mikro (65,59%), KUR Kecil (34,26%), KUR Penempatan PMI (0,0307%), dan KUR Khusus (0,0012%).

Mempertimbangkan Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR sampai dengan Triwulan I serta koordinasi yang efektif antar stakeholder, maka target tingkat efektivitas penyaluran KUR hingga akhir tahun 2025 diproyeksikan dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

1.2 Tingkat Efektivitas Penyaluran KUR			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Rapat koordinasi pelaksanaan KUR 2025	Terlaksana	Rapat Konsolidasi Pelaksanaan KUR Tahun 2025 tanggal 15 Januari 2025
2.	Pembahasan konsep perubahan Permenko Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR	Terlaksana	Sosialisasi Draft Pedoman Pelaksanaan Reviu Penyaluran Program KUR Tanggal 21 Maret 2025
3.	Penyaluran KUR kepada komunitas dan klaster	Terlaksana	Telah dilakukan penyaluran KUR kepada komunitas dan klaster sesuai dengan arahan Menko

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, sebagai berikut:

- 1. Koordinasi dan sinkronisasi yang perlu ditingkatkan Kembali antar K/L
- 2. Komunikasi yang efektif yang perlu ditingkatkan kembali antar stakeholder KUR

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan kedepannya:

- 1. Memperkuat koordinasi teknis
- 2. Memperkuat komunikasi yang efektif antar stakeholder

1.3. Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah

Latar Belakang

Posisi Badan Usaha Milik Negara sebagai *value creator* dan *agent of development* menjadi hal yang krusial dalam mendukung prioritas pembangunan nasional. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, BUMN diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan kualitas

sebagai agen pembangunan, peningkatan peran pada program strategis dan perintis, serta optimalisasi peran pada program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah kemudian memberikan berbagai penugasan kepada beberapa BUMN untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2025.

IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Penugasan Pemerintah kepada BUMN menggambarkan bagaimana realisasi pelaksanaan penugasan yang dapat berupa kegiatan yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden, penugasan dari kementerian/lembaga, ataupun sebagai hasil kesepakatan. Sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, daftar penugasan Pemerintah kepada BUMN yang dikoordinasikan dapat diuraikan sebagai berikut:

Daftar Penugasan Pemerintah kepada BUMN

No	Sektor	Penugasan
1	Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi	1. Penurunan Harga Tiket Pesawat HBKN 2025 melalui Diskon PJ2U & PJ4U 2. Penurunan Harga Tiket Pesawat HBKN 2025 melalui diskon Fuel Surcharge (FS)
2	Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) 2. Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) 3. Penyediaan dan Pendistribusian Isu Ulang LPG Tabung 3kg 4. Penyediaan dan Pendistribusian Paket Perdana LPG untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan Sasaran 5. Pemberian Diskon Listrik sebesar 50% untuk Konsumen Rumah Tangga 6. Pemberian subsidi Tarif Tenaga Listrik untuk Rumah Tangga Konsumen (Golongan tarif bersubsidi dan golongan tarif tertenu) 7. Melaksanakan Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Pipa Gas Bumi WNTS-Pemping
3	Sektor Industri Manufaktur, Agro, Farmasi & Kesehatan	1. Perluasan lahan tebu 2. Peningkatan Produksi gula 3. Peningkatan Rendemen gula
4	Sektor Infrastruktur dan Logistik	1. Percepatan penyelesaian pembangunan berbagai seksi Jalan Tol Trans Sumatera 2. Diskon Tarif Tol dan Tarif Transportasi dalam rangka HBKN Lebaran dan periode Liburan Sekolah tahun 2025
5	Sektor Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	1. Penyalur Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian dan Penyaluran Kredit Industri Padat Karya 2. Pelaksanaan Penugasan Pengembangan Ekosistem Usaha Bullion

Perhitungan capaian dapat dijelaskan lebih lanjut dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Persentase Realisasi Penugasan} = \frac{\text{Total Penugasan Pemerintah yang Diselesaikan}}{\text{Total Penugasan Pemerintah yang Diberikan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target IKU Persentase Realisasi Penugasan Pemerintah adalah sebesar 80% yang ditetapkan berdasarkan Dialog Kinerja serta koordinasi dengan Kementerian BUMN dan BUMN. Indikator Penyelesaian Penugasan dijelaskan lebih lanjut pada Manual IKU masing-masing Asisten Deputi pengampu penugasan.

Adapun target tiap triwulan ditetapkan sebesar 20% dengan menggunakan metode prorata untuk memastikan target kinerja terdistribusi merata sepanjang tahun, sehingga pencapaian target kinerja dapat lebih terukur dan realistis.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah yang telah terealisasi sebesar 25% atau mencapai 125% dari target Triwulan I tahun 2025 sebesar 20% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
1.3 Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah	Persen	20	25	120%

Rincian penugasan pemerintah yang telah selesai sebagaimana berikut:

Sektor	Penugasan
Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi	1. Penurunan Harga Tiket Pesawat HBKN 2025 melalui Diskon PJ2U & PJ4U 2. Penurunan Harga Tiket Pesawat HBKN 2025 melalui diskon Fuel Surcharge (FS)
Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	3. Pemberian Diskon Listrik sebesar 50% untuk Konsumen Rumah Tangga
Sektor Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	4. Pelaksanaan Penugasan Pengembangan Ekosistem Usaha Bullion

Dari total 16 Penugasan Pemerintah kepada BUMN, 4 penugasan telah selesai sehingga persentase penyelesaian penugasan dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Persentase Realisasi Penugasan} = \frac{4}{16} \times 100\% = 25,00\%$$

IKU ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan peran BUMN untuk mendukung agenda pembangunan ekonomi nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan usaha.

Mempertimbangkan persentase realisasi penugasan pemerintah kepada BUMN sampai dengan Triwulan I serta upaya yang dilakukan, maka target persentase penyelesaian penugasan pemerintah kepada BUMN hingga akhir tahun 2025 diproyeksikan dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

1.3 Persentase Penyelesaian Penugasan Pemerintah			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Rakor Pengembangan Ekosistem Kegiatan Usaha Bullion	Terlaksana	1. Telah dilakukan Rapat Pembahasan Pengembangan Ekosistem Kegiatan Usaha Bulion pada tanggal 13 Januari 2025 2. Mengikuti Launching Kegiatan Usaha Bulion yang diresmikan oleh Presiden RI tanggal 26 Februari 2025
2.	Rakor Kebijakan Percepatan Swasembada Gula bersama K/L terkait maupun BUMN sektor Agro	Terlaksana	Koordinasi telah dilakukan dengan BUMN dan K/L yang terkait dalam produksi dan distribusi gula nasional, yang membahas roadmap swasembada gula, termasuk target rendemen, perluasan lahan tebu, dan integrasi dengan program ketahanan pangan. Hasil koordinasi menjadi dasar evaluasi dan penyusunan rencana kerja bersama.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pemanfaatan anggaran sesuai kebutuhan organisasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, antara lain:

1. Perbedaan pendekatan bisnis antar-BUMN, khususnya antara entitas *holding* dan anak usaha, menimbulkan tantangan dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang bersifat lintas entitas dan tetap relevan secara operasional.
2. Integrasi data yang belum optimal antara BUMN (PTPN Group dan ID FOOD) dengan kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian BUMN, menghambat analisis rantai pasok secara menyeluruh dan berdampak pada akurasi proyeksi.

Sebagai upaya perbaikan, unit kerja mendorong pembentukan satgas lintas K/L dan BUMN untuk memperkuat koordinasi teknis, serta menyusun template rekomendasi kebijakan yang mengakomodasi fleksibilitas model bisnis masing-masing entitas.

2 Sasaran Program 2: Terwujudnya Tingkat Inflasi pada Kisaran Sasaran

Pencapaian Sasaran Program 2: Terwujudnya Tingkat Implementasi pada Kisaran Sasaran ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja Tingkat Inflasi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1. Tingkat Inflasi Latar Belakang

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Dengan kondisi tersebut, tingkat inflasi perlu dikendalikan mengingat inflasi yang tinggi dan tidak stabil dapat memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

IKU Tingkat inflasi menggambarkan bagaimana upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi pada target yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, target inflasi ditetapkan oleh Pemerintah setiap tahun dalam UU tentang APBN dan UU tentang Rencana Kerja Pemerintah. IKU Tingkat Inflasi ini merupakan pengejawantahan dari tugas Kedeputan 1 pada Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) sebagai Kepala Sekretariat berdasarkan Keputusan Menko Perekonomian No. 313 tahun 2023 yang merupakan salah satu peraturan pelaksana Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN).

IKU Tingkat Inflasi dihitung dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) yaitu indikator yang mengukur rata-rata perubahan harga dari sekumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Perhitungan tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Inflasi} = \frac{\text{IHK}_t - \text{IHK}_{t-1}}{\text{IHK}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

IHK_t : IHK periode ini

IHK_{t-1} : IHK periode sebelumnya

Hasil Pengukuran Kinerja

Adapun target IKU Tingkat Inflasi pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 2,5% ± 1%. Target tersebut ditetapkan berdasarkan amanat dalam UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun Anggaran 2025 dan Perpres Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 serta PMK No. 31 Tahun 2024 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2025, Tahun 2026, dan Tahun 2027.

Adapun target tiap triwulan sama dengan target tahunan (2,5% ± 1%) untuk tetap menjaga tingkat inflasi sepanjang tahun.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, tingkat inflasi sebesar 1,03% atau mencapai 68,67% dari target Triwulan I tahun 2025 sebesar 2,5% ± 1% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
2.1 Tingkat Inflasi	Persen	2,5% ± 1%	1,03%	68,67 %

Untuk menghitung Indeks Capaian Kinerja digunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Lower Target}} = \frac{1,03\% \times 100\%}{1,5\%} = 68,67\%$$

Pada Maret 2025 terjadi inflasi sebesar 1,65% (mtm), setelah sebelumnya mengalami deflasi 2 bulan secara beruntun. Inflasi pada Triwulan I utamanya masih dipengaruhi oleh komoditas tarif listrik yang kembali normal (tanpa diskon) seiring dengan berakhirnya program pemberian diskon 50% dan mengalami inflasi sebesar 1,18%. Namun demikian, pelanggan pasca bayar masih mengalami penurunan harga atas konsumsi pada Maret 2025.

Inflasi pada tahun 2025 diperkirakan akan terkendali pada rentang sasaran dan berada pada titik tengah 2,60% (yoy) dengan batas atas 2,80% (yoy). Inflasi tahun 2025 diperkirakan akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global, kebijakan moneter bank sentral negara maju, fluktuasi harga komoditas global baik energi maupun pangan, serta kondisi cuaca yang dapat mempengaruhi hasil produksi komoditas pangan.

Mempertimbangkan realisasi tingkat inflasi sampai dengan Triwulan I serta koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah, TPIP, TIPID, serta stakeholder terkait, maka target tingkat inflasi hingga akhir tahun 2025 diproyeksikan akan berada pada rentang sasaran.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

2.1. Tingkat Inflasi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Pelaksanaan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP)	Terlaksana	Telah dilaksanakan HLM TPIP Tingkat Menteri di Kantor Kemenko Perekonomian tanggal 31 Januari 2025
2.	Penetapan Program Kerja TPIP dalam pengendalian inflasi 2025	Terlaksana	Telah dilaksanakan HLM TPIP Tingkat Menteri di Kantor Kemenko Perekonomian tanggal 31 Januari 2025
3.	Penyiapan dan penyampaian laporan kepada Presiden terkait realisasi inflasi dan intervensi Pemerintah TW I	Terlaksana	Telah disusun dan disampaikan kepada Presiden melalui surat nomor : B/EK.02.01-117/M.EKON/04/2025
4.	Penyusunan surat himbauan kepada TPID dan atau K/L anggota TPIP terkait persiapan HBKN Ramadhan dan Idul Fitri	Terlaksana	Penyampaian surat himbauan oleh Menko ke seluruh kepala daerah perihal Upaya Menjaga Stabilitas Harga pada Momen Lebaran dan Hari Raya Idul Fitri 2025

5.	Pelaksanaan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Terlaksana	Telah dilaksanakan High Level Meeting TPID di beberapa daerah sebagai bentuk sinergi dalam upaya menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi menjelang Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah. Salah satunya DKI Jakarta tanggal 5 Maret 2025
----	--	------------	--

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sepanjang Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, antara lain:

1. Ketidakpastian ekonomi global yang berasal dari peningkatan tensi geopolitik dan konflik Timur-Tengah mendorong peningkatan harga komoditas global. Pelemahan nilai tukar akibat indeks dollar (DXY) yang menguat, serta harga emas global turut mendorong laju inflasi di banyak negara termasuk Indonesia
2. Pada Januari-Februari 2025 terjadi deflasi utamanya dipengaruhi oleh komoditas tarif listrik. Hal tersebut dipengaruhi oleh pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% kepada pelanggan rumah tangga dengan daya 450 VA-2200 VA selama bulan Januari-Februari 2025.
3. Kelompok *volatile food* (VF) mengalami peningkatan harga utamanya produk hortikultura yang dipengaruhi oleh keterbatasan produksi akibat gangguan cuaca seperti produksi bawang merah yang mengalami kendala akibat gangguan cuaca yang menyebabkan banjir di beberapa daerah sentra produksi terutama wilayah Pantura dan produksi cabai mengalami penurunan akibat gangguan cuaca yang terjadi di beberapa wilayah di antaranya di Jawa Tengah. Sementara peningkatan harga daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi dan beras didorong oleh kenaikan permintaan selama periode HBKN Idul Fitri.
4. Inflasi inti tetap stabil disumbang oleh kenaikan permintaan pada masa HBKN Idulfitri yang terbatas dan ekspektasi inflasi yang menurun di tengah kenaikan tekanan dari sisi eksternal yang tecermin dari peningkatan beberapa harga komoditas global, terutama emas, dan pelemahan nilai tukar.
5. Inflasi administered *price* (AP) didorong oleh adanya stimulus pemerintah untuk listrik dan jasa angkutan yang membawa kelompok AP mengalami deflasi selama 2 bulan berturut-turut

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, antara lain:

1. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dengan subtema tematik per kawasan
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi kepada anggota TPID maupun K/L terkait

3 Sasaran Program 3: Terwujudnya Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah

Pencapaian Sasaran Program 3: Terwujudnya Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1. *Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital*

Latar Belakang

Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital digambarkan melalui Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (Indeks ETPD). Indeks ETPD merupakan profil ETPD dari seluruh pemerintah daerah yang diukur melalui komposit atas sub indeks implementasi (dengan bobot 70%), sub indeks realisasi (dengan bobot 10%), dan sub indeks lingkungan strategis (dengan bobot 20%). Dalam hal pengukuran, Indeks ETPD didapatkan dari data yang bersumber dari survei secara semesteran kepada seluruh pemerintah daerah menggunakan platform yang dikelola oleh Satgas P2DD, yakni Sistem Informasi P2DD. Pengkategorian pemerintah daerah berdasarkan Indeks ETPD meliputi:

- Digital (skor indeks 80-100)
- Maju (skor indeks 50-80)
- Berkembang (skor indeks 20-50)
- Inisiasi (skor indeks 0-20)

Adapun peran Kemenko Perekonomian dalam forum Satgas P2DD untuk mendukung pencapaian target IKU mencakup (dan tidak terbatas pada):

1. Penguatan ekosistem (diantaranya melalui dukungan koordinasi penyediaan sarana/prasarana, koordinasi penyusunan regulasi terkait, koordinasi pengusulan insentif daerah khusus untuk P2DD, koordinasi penguatan Bank RKUD, dll.)
2. Penguatan koordinasi (diantaranya melalui pelaksanaan Rakornas, Rakorpusda, Rakorwil, koordinasi tindak lanjut arahan Ketua Pengarah & Pelaksana Satgas P2DD dan koordinasi teknis lainnya)
3. Dukungan pelaksanaan survei
4. Sosialisasi dan Capacity Building Tim P2DD di daerah
5. Monitoring dan evaluasi

Hasil Pengukuran Kinerja

Target IKU Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 92% berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Sekretariat Satgas P2DD tanggal 17 Januari 2025.

Adapun target pelaporan dilakukan tiap semester yang diambil datanya dari hasil Survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. Survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah akan dilaksanakan pada Agustus 2025, sehingga realisasi Triwulan I Tahun 2025 diasumsikan masih sama dengan hasil survei tahun 2024 yaitu 91% atau mencapai 100% terhadap target Semester I sebesar 91%, dengan rincian sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
3.1 Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital	Persen	91%	91%	100%

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

3.1. Persentase Jumlah Pemerintah Daerah yang Masuk Kategori Digital			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Penetapan Program Kerja Satgas P2DD 2025	Terlaksana	Telah dilakukan penyusunan, penetapan, dan distribusi Surat Menko Perekonomian tentang Arah Kebijakan dan Program Kerja Satgas P2DD, Februari 2025
2.	Evaluasi Indeks ETPD Semester II 2024	Terlaksana	Telah dilaksanakan beberapa rapat koordinasi sebagai berikut: 1. Rapat Koordinasi Sekretariat Satuan Tugas P2DD Awal 2025, 17 Januari 2025; 2. Rapat Tindak Lanjut Rakor Sekretariat Satgas P2DD dengan BI dan Kementerian Keuangan, Januari 2025

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, antara lain:

1. Kesulitan menyatukan waktu dan komitmen berbagai pihak (K/L, Pemda) dalam rapat koordinasi, audiensi, maupun diskusi teknis.
2. Adanya perubahan struktur organisasi, nomenklatur, dan pejabat di K/L yang terkait.
3. Diterbitkannya Surat Edaran terkait efisiensi anggaran sehingga konsep/format rencana kegiatan perlu disesuaikan kembali. Selain itu, anggaran Keasdepan untuk Output P2DD masih terikat pada Kedeputan II, sehingga perlu koordinasi untuk penyesuaian Renja dan RAB.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai antara lain melalui peningkatan koordinasi lintas pihak secara lebih terstruktur, percepatan penyesuaian dokumen perencanaan dan anggaran, penyesuaian konsep/format kegiatan yang akan datang serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

4 Sasaran Program 4: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 4: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan BUMN yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Reguler dan Penugasan Umum
2. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, dan Digitalisasi Daerah

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Reguler dan Penugasan Umum

Latar Belakang

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha badan usaha milik negara.

Indeks Efektivitas SKP merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi diantaranya **rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).** Kemudian isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN adalah:

1. Realisasi Belanja Modal BUMN
2. Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)
3. Penyelesaian Penugasan Pemerintah

Indeks Efektivitas sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian kebijakan di bidang perekonomian diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan pada setiap indikator *internal bussiness* yang diampu oleh unit kerja dibawahnya (Asisten Deputi). Adapun penjelasan empat tahapan yang menggambarkan tingkat efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN.

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan perekonomian didapat dengan didasarkan pada nilai indeks efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang terdapat pada seluruh Asisten Deputi dan dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{Indeks Efektivitas SKP} = \sqrt[5]{SKP\ AD\ 1 \times SKP\ AD\ 2 \times SKP\ AD\ 3 \times SKP\ AD\ 4 \times SKP\ AD\ 5}$$

1. Sinkronisasi, Koordinasi, Pengendalian kebijakan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi (SKP AD 1) dihitung berdasarkan rata-rata capaian SKP:
 - a) Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dalam penyelenggaraan Event dan Konektivitas Destinasi Pariwisata Super Prioritas
 - b) Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait pengembangan BUMN Bidang Telekomunikasi melalui Investasi Perluasan Jaringan Telekomunikasi
2. Sinkronisasi, Koordinasi, Pengendalian kebijakan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Energi Sumber Daya Mineral (SKP AD 2) dihitung berdasarkan rata-rata capaian SKP :

- a) Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian pembentukan IBMA dalam rangka mendukung Ekosistem Bullion
- b) Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Pengembangan Bioethanol sebagai Bahan Bakar Nabati
- c) Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Hilirisasi – Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1
- d) Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Program Strategis BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Sinkronisasi, Koordinasi, Pengendalian kebijakan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan (SKP AD 3) dihitung berdasarkan rata-rata capaian SKP :
 - a) Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Bahan Baku Obat (BBO) oleh BUMN
 - b) Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Industri Baja oleh BUMN
 - c) Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Peningkatan Sumber Bahan Baku Berbasis Tebu
4. Sinkronisasi, Koordinasi, Pengendalian kebijakan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik (SKP AD 4) dihitung berdasarkan rata-rata capaian SKP :
 - a) Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Integrasi Multimoda
 - b) Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Kerjasama Antardaerah dalam Mendorong Pengembangan Infrastruktur dan Logistik Daerah
 - c) Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Inovasi Pembiayaan Daerah
5. Sinkronisasi, Koordinasi, Pengendalian kebijakan Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis (SKP AD 5) dihitung berdasarkan rata-rata capaian SKP:
 - a. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait penyaluran KUR, KUA, dan KIPK
 - b. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait pengembangan Ekosistem Kegiatan Usaha Bullion

Nilai Akhir Indeks efektivitas SKP digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN.

Hasil indeks SKP lalu dikonversikan ke skala, dengan rincian sebagai berikut:

- Sangat Efektif (4), rentang nilai 91 - 100
- Efektif (3), rentang nilai 81 - 90
- Cukup Efektif (2), rentang nilai 71 - 80
- Kurang efektif (1), rentang nilai < 70

Hasil Pengukuran Kinerja

Target IKU Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) Kebijakan Reguler dan Penugasan Umum adalah pada skala efektif (3). Untuk menghitung nilai Indeks dibutuhkan capaian nilai Indeks SKP masing-masing Asdep pada TW I sebagai berikut:

No	Unit Eselon II	Indeks Efektivitas SKP
1	Asdep Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi	20

2	Asdep Pengembangan BUMN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	20
3	Asdep Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan	20
4	Asdep Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik	20
5	Asdep Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis	20

Penghitungan Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dihitung dengan formula berikut:

$$\text{Indeks Efektivitas SKP} = \sqrt[5]{SKP\ AD\ 1 \times SKP\ AD\ 2 \times SKP\ AD\ 3 \times SKP\ AD\ 4 \times SKP\ AD\ 5}$$

Hasil penghitungan diperoleh nilai akhir Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Reguler dan Penugasan Umum pada Triwulan I sebesar 20% dan apabila dikonversikan berada pada skala **kurang efektif (1 dari 4)**.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Reguler dan Penugasan Umum	Indeks	3 dari 4	1 dari 4	33,33

Memperhatikan upaya setiap keasdepan dalam mencapai efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN untuk kegiatan reguler dan penugasan umum sampai dengan Triwulan I, maka Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan hingga akhir tahun 2025 diproyeksikan dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

4.1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Reguler dan Penugasan Umum			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Identifikasi Permasalahan Kebijakan Utilisasi Belanja Modal tahun 2025	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan program kerja PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Pada tanggal 28 Februari 2025

2.	Identifikasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat	Permasalahan Penyaluran	Terlaksana	1. Rapat Pembahasan Rpermenko KUR, KUA, dan KIPK bersama dengan Biro HO Tanggal 4 Maret 2025 2. Rapat Permenko KUR dan KUA bersama Biro Hukum dan Organisasi Tanggal 6 Maret 2025 3. Konsultasi Publik Program Kredit Industri Padat Karya Tanggal 16 Maret 2025 4. Rapat Pengharmonisasian Rpermenko KUR, KUA, dan KIPK Tanggal 24 Maret 2025
3.	Identifikasi Kebijakan Penugasan BUMN	Permasalahan Penyelesaian	Terlaksana	Telah dibahas dalam Dialog Kinerja tanggal 20 Januari 2025

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh masing-masing unit Asisten Deputi sebagai berikut:

1. Asdep Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi
 - a. Kompleksitas isu lintas sektor memerlukan koordinasi intensif antar K/L yang sering terhambat perbedaan prioritas, atau kewenangan;
 - b. Masih adanya keterbatasan data teknis atau legalitas, perizinan, pembiayaan dan ekosistem.
2. Asdep Pengembangan BUMN Bidang ESDM
 - a. Terdapat perubahan direksi berdasarkan hasil RUPS masing-masing perusahaan pendiri Indonesia Bullion Market Association (IBMA).
 - b. Terdapat perubahan struktur organisasi baik di internal Kemenko Bidang Perekonomian maupun perubahan manajemen pada BUMN Bidang ESDM.
 - c. Terdapat perbedaan pandangan antara K/L dan BUMN terkait percepatan pengembangan bioethanol sebagai bahan bakar nabati sehingga memerlukan proses pendalaman masalah lebih lanjut khususnya terkait insentif cukai dan bioethanol.
 - d. Permasalahan tumpang tindih lahan di lokasi pengembangan hauling road, landfill area dan area tambang dengan PT Palm Agro Makmur yang menghambat pembangunan proyek SGAR.
3. Asdep Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan
 - a. Pengendalian kebijakan Bahan Baku Obat menghadapi kendala keterbatasan kapasitas produksi, ketergantungan tinggi pada impor, dan belum optimalnya dukungan regulasi serta kelembagaan. Selain itu, isu

- efisiensi biaya, turut menghambat percepatan pengembangan industri dalam negeri.
 - b. ketergantungan pada data dan sinergi antar Kementerian/Lembaga serta BUMN, khususnya untuk memperoleh data utilisasi kapasitas dan proyeksi suplai-demand baja secara nasional.
 - c. masih adanya praktik impor tidak adil (*dumping*, non-SNI, *circumvention*) juga menjadi tantangan besar dalam pengendalian kebijakan industri baja.
 - d. Komitmen K/L masih bervariasi karena perbedaan prioritas internal dan keterbatasan anggaran
 - e. Proses perizinan dan sinkronisasi program antar K/L belum optimal
 - f. Ownership program belum sepenuhnya terdistribusi, terutama di level pelaksana teknis
4. Asdep Pengembangan BUMN Bidang Infrastruktur dan Logistik
Hingga Triwulan I Tahun 2025, tidak ada kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
 5. Asdep Pengembangan BUMN Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis
 - a. Koordinasi dan sinkronisasi yang perlu ditingkatkan lagi antar Kementerian/Lembaga.
 - b. Komunikasi efektif perlu ditingkatkan lagi antar *stakeholders* KUR

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Dilakukan percepatan melalui rapat koordinasi lintas kementerian, konsinyering, serta penguatan peran Kemenko sebagai orkestrator utama untuk memastikan keputusan strategis tepat waktu dan komprehensif;
2. Dilakukan pendekatan kolaboratif antara sektor untuk mempercepat desain program dan mendorong pembiayaan kreatif yang terukur dampaknya.
3. Memperkuat koordinasi teknis
4. Memperkuat komunikasi yang efektif

4.2 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, dan Digitalisasi Daerah

Latar Belakang

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan dan pengembangan usaha badan usaha milik negara.

Indeks Efektivitas SKP merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi. Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi diantaranya

rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan). Kemudian isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN adalah:

1. Inflasi
2. Stimulus Ekonomi
3. Digitalisasi Daerah

Indeks Efektivitas sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian kebijakan di bidang perekonomian diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan pada setiap indikator *internal bussiness* yang diampu oleh unit kerja dibawahnya (Asisten Deputy). Adapun penjelasan empat tahapan yang menggambarkan tingkat efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang dilakukan oleh Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN.

Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (*agenda setting*)

Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputy dan *stakeholder* terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputy dan *stakeholder* terkait selanjutnya menjadi *input* dalam tahapan selanjutnya.

Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh *stakeholder* dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan.

Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan perekonomian didapat dengan didasarkan pada nilai indeks efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang terdapat pada seluruh asisten deputy dan dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{Indeks Efektivitas SKP} = \sqrt[3]{SKP \text{ Inflasi} \times SKP \text{ Stimulus Ekonomi} \times SKP \text{ Digitalisasi}}$$

1. Sinkronisasi, Koordinasi, Pengendalian Inflasi (SKP Inflasi)

Inflasi yang tercermin melalui Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Stabilitas Harga terutama pada komoditas pangan strategis melalui penguatan peran dan sinergi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Daerah (TPID), yang diampu oleh Asisten Deputy Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan.

2. Sinkronisasi, Koordinasi, Pengendalian Stimulus Ekonomi (SKP Stimulus Ekonomi)

Stimulus Ekonomi merupakan upaya peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor riil yang berorientasi pada penciptaan nilai tambah dan padat karya yang tercermin melalui Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Sektor Eksternal termasuk penguatan neraca transaksi berjalan serta antisipasi dampak kebijakan eksternal seperti tarif ekspor-impor oleh negara mitra dagang antara lain kebijakan tarif AS dan dinamika politik di Timur Tengah, yang diampu oleh Asisten Deputy Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi, dan Kesehatan

3. Sinkronisasi, Koordinasi, Pengendalian Digitalisasi Daerah (SKP Digitalisasi Daerah)

Digitalisasi Daerah merupakan proses transformasi suatu daerah melalui pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin melalui Persentase efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait partisipasi Pemerintah Daerah dalam survei Indeks ETPD diampu oleh Asisten Deputy Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi.

Nilai Akhir Indeks efektivitas SKP digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN.

Hasil indeks SKP lalu dikonversikan ke skala, dengan rincian sebagai berikut:

- Sangat Efektif (4), rentang nilai 91 - 100
- Efektif (3), rentang nilai 81 - 90
- Cukup Efektif (2), rentang nilai 71 - 80
- Kurang efektif (1), rentang nilai < 70

Hasil Pengukuran Kinerja

Target IKU Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, dan Digitalisasi Daerah Triwulan I adalah pada skala 3 (efektif). Untuk menghitung nilai Indeks dibutuhkan capaian nilai Indeks SKP Isu Strategis pada TW I sebagai berikut:

No	Isu Strategis	Indeks Efektivitas SKP
1	Inflasi	20
2	Stimulus Ekonomi	20
3	Digitalisasi Daerah	20

Penghitungan Nilai Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dihitung dengan formula berikut:

$$\text{Indeks Efektivitas SKP} = \sqrt[3]{SKP \text{ Inflasi} \times SKP \text{ Stimulus Ekonomi} \times SKP \text{ Digitalisasi}}$$

Hasil penghitungan diperoleh nilai akhir Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Reguler dan Penugasan Umum pada Triwulan I sebesar 20% dan apabila dikonversikan berada pada skala **kurang efektif (1 dari 4)**.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
4.2 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, dan Digitalisasi Daerah	Indeks	3 dari 4	1 dari 4	33,33

Memperhatikan upaya setiap keasdepan dalam mencapai efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, dan Digitalisasi Daerah sampai dengan Triwulan I, maka Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, dan Digitalisasi Daerah hingga akhir tahun 2025 diproyeksikan dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

4.2. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Inflasi, Stimulus Ekonomi, dan Digitalisasi Daerah				
No	Rencana Aksi TW I		Status	Keterangan
1.	Koordinasi Penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025 - 2027		Terlaksana	Telah dilakukan koordinasi dan finalisasi Penyusunan Peta Jalan dengan seluruh anggota TPIP tanggal 20 Maret 2025
2.	Pelaksanaan Kinerja TPID	Evaluasi	Terlaksana	Telah dilaksanakan evaluasi kinerja TPID tahun 2024 tahap I tanggal 10-14 Maret 2025

3.	Rapat Koordinasi Stimulus Ekonomi TW I Tingkat Eselon I	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rakor pada tanggal 27 Februari 2025
4.	Monitoring Pelaksanaan Stimulus Ekonomi TW I	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rakor pada tanggal 27 Februari 2025
5.	Identifikasi Permasalahan Kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah	Terlaksana	Telah dilaksanakan melalui penyelenggaraan beberapa kegiatan Diskusi Pengembangan Indeks ETPD Ke Depan dengan ADB dan BI selama Februari 2025

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi tiap isu strategis sebagai berikut:

1. Pengendalian Inflasi
 - a. Kelompok *volatile food* (VF) mengalami peningkatan harga utamanya produk hortikultura yang dipengaruhi oleh keterbatasan produksi akibat gangguan cuaca.
 - b. Inflasi inti tetap stabil disumbang oleh kenaikan permintaan pada masa HBKN Idulfitri yang terbatas dan ekspektasi inflasi yang menurun di tengah kenaikan tekanan dari sisi eksternal yang tecermin dari peningkatan beberapa harga komoditas global, terutama emas, dan pelemahan nilai tukar.
 - c. Inflasi administered *price* (AP) didorong oleh adanya stimulus pemerintah untuk listrik dan jasa angkutan yang membawa kelompok AP mengalami deflasi selama 2 bulan berturut-turut
2. Stimulus Ekonomi
 - a. Permintaan bahan pada waktu yang mendesak menjadi tantangan, untuk mempermudah koordinasi, kerja bersama dilakukan melalui aplikasi *onedrive* serta dibuat database update perekonomian terkini sehingga dapat langsung digunakan ketika dibutuhkan dalam menyusun suatu bahan.
 - b. Penghematan anggaran pemerintah dapat membebani kinerja perekonomian untuk tahun 2025 sehingga diperlukan upaya lebih lanjut agar target pertumbuhan tercapai.
 - c. Pelantikan Presiden AS, Donald Trump, dapat meningkatkan ketidakpastian ekonomi global seiring Trump terus mengancam akan meningkatkan tarif impor produk secara unilateral sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk menjaga kestabilan sektor eksternal Indonesia khususnya kinerja ekspor nasional.
3. Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
 - a. Partisipasi dan kualitas pengisian belum optimal, dimana sebagian kecil pemda & BPD tidak dapat mengikuti sosialisasi secara penuh karena keterbatasan waktu, kesibukan operasional, atau kendala teknis (jika dilakukan daring).
 - b. Tingkat pemahaman tidak merata, dengan pengisi survei dan pemilik/pengelola data memiliki latar belakang dan tingkat pemahaman yang berbeda terhadap materi ETPD, sehingga terjadi kesenjangan pemahaman selama survei berlangsung

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Peningkatan metode penyampaian materi: Mengoptimalkan metode penyampaian dengan kombinasi penjelasan terstruktur, sesi tanya jawab interaktif, dan simulasi pengisian, sehingga peserta lebih mudah memahami materi serta termotivasi untuk berpartisipasi secara penuh.
2. Penyediaan materi lanjutan: Memberikan bahan presentasi, video rekaman, dan akses konsultasi lanjutan pasca-sosialisasi untuk memperkuat pemahaman dan tindak lanjut di daerah masing-masing.
3. Penguatan Tim Kerja dan peningkatan kapasitas pegawai melalui berbagai pelatihan serta penggunaan teknologi informasi termasuk one drive. Terkait kebijakan DHE SDA, diperlukan monitoring atas implementasi PP 8/2025 untuk memastikan efektifitas kebijakan.

5 Sasaran Program 5: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 5: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas ditunjukkan oleh indikator kinerja

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di bidang koordinasi pengelolaan dan pengembangan usaha BUMN merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei yang dilakukan adalah survei skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan *Google Form*.

Tujuan dari IKU ini adalah untuk mengukur tingkat efektivitas dari proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan koordinasi pengelolaan dan pengembangan usaha BUMN sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dilakukan dengan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/*stakeholder* terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut

**Indeks Kepuasan
Layanan Sinkronisasi,
Koordinasi, dan
Pengendalian**

$$= \frac{\text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep}}{5}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 3 dari 4, penetapan target berdasarkan Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Tahun 2025.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, belum ada pelaksanaan Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN. Survei dilaksanakan pada akhir Semester I dan Semester II Tahun 2025, sehingga realisasi Triwulan I Tahun 2025 diasumsikan masih sama dengan hasil survei tahun 2024 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi	% Kinerja
5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas	Indeks	3 dari 4	3	100

Sampai dengan Triwulan I, Deputy 1 berupaya memberikan layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsi dari Deputy I yang tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Memperhatikan hal tersebut, maka persentase pemenuhan target Indeks Kepuasan Layanan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan BUMN hingga akhir Semester I Tahun 2025 diproyeksikan dapat tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

5.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Persiapan Survei Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Semester I	Terlaksana	1. Telah dilaksanakan penyusunan konsep awal survei kepuasan layanan kepada stakeholders oleh masing-masing unit Eselon II

-
2. Telah dilaksanakan inventarisasi responden survei
-

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I Tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pemanfaatan google form sebagai instrumen kuesioner survei.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga Triwulan I Tahun 2025, tidak ada kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

6 Sasaran Program 6: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 6: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas ditunjukkan oleh indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

6.1. *Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN*

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN merupakan persentase pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Deputy didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/ atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Implementasi kegiatan RB General dan/ atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana tertuang pada Peraturan Sekretaris Kementerian. Rencana Aksi Deputy terkait pemenuhan tingkat keberhasilan Zona Integritas, nilai SAKIP, dan tingkat digitalisasi arsip.

Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN:

$$\text{Persentase Pelaksanaan RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang Dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang Dirumuskan}} \times 100\%$$

Pada tahun 2025, telah dirumuskan 11 Renaksi RB Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN dengan rincian sebagai berikut:

Renaksi TW I	Renaksi TW II	Renaksi TW III	Renaksi TW IV
1. Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerj	1. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	1. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	1. Fasilitasi Pembangunan ZI di Unit Kerja

2. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	2. Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi	2. Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi	2. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan
3. Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi			3. Penyusunan draft Perjanjian Kinerja tahun 2026
			4. Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi

Hasil Pengukuran Kinerja

Untuk menghitung capaian kinerja pada Triwulan I, perlu diketahui pelaksanaan dari Rencana Aksi TW I sebagai berikut:

No	Rencana Aksi TW I	Status
1.	Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja	Terlaksana
2.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana
3.	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase Pelaksanaan RB} &= \frac{3}{11} \times 100\% \\
 &= 27,27\%
 \end{aligned}$$

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW I	Realisasi	% Kinerja
6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengelolaan BUMN	Persen	20	27,27	120

Pencapaian kinerja IKU Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengelolaan BUMN yang memenuhi target menunjukkan sasaran Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang Berkualitas tercapai. Tata kelola yang baik merupakan landasan penting bagi organisasi untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang diemban. Ketercapaian sasaran strategis ini akan secara signifikan mendorong terwujudnya pelaksanaan proses bisnis Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN yang berfokus pada sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang efektif. Dengan tata kelola yang baik, organisasi dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

6.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengelolaan BUMN

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1.	Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja	Terlaksana	Telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja pada bulan Januari 2025
2.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana	Telah dilaksanakan pada bulan April 2025
3.	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Implementasi Srikandi dilakukan untuk administrasi pemberkasan surat masuk maupun keluar. Selain itu, pemberian disposisi juga menggunakan aplikasi Srikandi

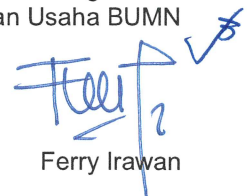
Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya adalah:

- Sebagian pelaksanaan koordinasi dilaksanakan secara *hybrid* menggunakan media komunikasi telekonferens (online), sehingga perjalanan dinas luar kota dilaksanakan selektif sesuai dengan urgensi.
- Pemberkasan administrasi persuratan sudah menggunakan aplikasi Srikandi dan media penyimpanan cloud sehingga sudah tidak memerlukan banyak peralatan ATK seperti kertas ataupun lemari untuk administrasi surat-surat tersebut.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Hingga Triwulan I Tahun 2025, tidak ada kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Jakarta, 14 April 2025
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan
dan Pengembangan Usaha BUMN


Ferry Irawan